

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau yang sangat banyak. Menurut data SLHI 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466 dengan garis pantai sepanjang 80.791 km. Keberadaan pulau-pulau ini memberikan kesempatan sekaligus menghadapi tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya alam. Kawasan pesisir dan laut Indonesia kaya akan sumber daya alam dan menyediakan berbagai jasa lingkungan, seperti minyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang dan mangrove, serta pariwisata. Namun, sayangnya, sumber daya di wilayah pesisir dan laut Indonesia belum mendapatkan perhatian serius seperti pembangunan di wilayah daratan pada masa lampau (Pramudyanto, 2014). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan tempat penampungan sampah, yang seringkali menyebabkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Hanya sekitar 60% sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Jannah, 2019).

Jumlah populasi di pesisir daerah perkotaan yang semakin meningkat, ternyata menyebabkan sumber daya di daratan otomatis semakin terbatas. Meningkatnya aktivitas penduduk di wilayah pesisir, termasuk dalam aspek pemukiman, pertanian, dan industri, telah mengakibatkan peningkatan dalam produksi limbah, termasuk limbah cair dan padat. Karena itu, wajar jika dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia, fokus utamanya ditujukan kepada pengembangan wilayah pesisir dan laut (Adnan, 2015). Contoh nyata, dampak dari pembangunan pabrik atau industri bisa berupa emisi bau tak sedap atau limbah cair. Meskipun pembangunan industri dapat membawa dampak positif seperti menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, dampak negatif seperti polusi dan kerusakan lingkungan di sekitar

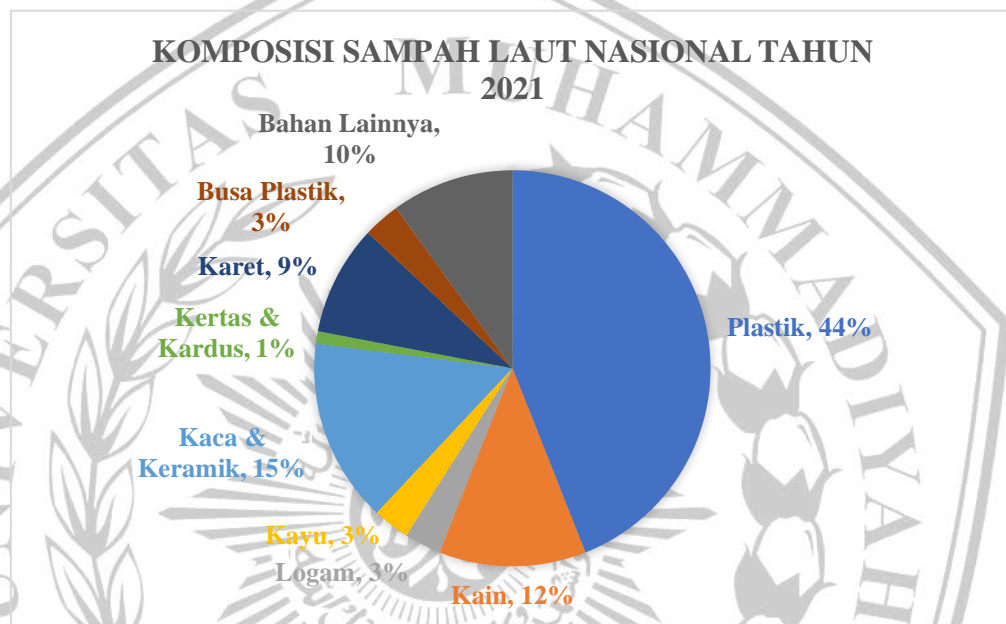
area industri perlu diatasi dengan langkah-langkah pencegahan dan penindakan (Adnan, 2015).

Plastik merupakan salah satu sumber sampah yang signifikan di pantai. Plastik memiliki karakteristik yang unik, seperti murah, ringan, tahan lama, tahan terhadap korosi, dan memiliki sifat isolator yang tinggi. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan plastik sebagai bahan yang banyak digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari teknologi hingga sektor kesehatan. Seiring pertambahan populasi dan peningkatan standar hidup, produksi plastik mengalami peningkatan drastis dari sekitar 0,5 juta ton per tahun pada tahun 1950 menjadi sekitar 260 juta ton per tahun saat ini. (Wabnitz & Nichols, 2010). Namun, efek dari penggunaan plastik ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik setelah pemakaian. Plastik sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi. Banyak plastik yang akhirnya berakhir sebagai sampah, termasuk di pantai, menyebabkan pencemaran lingkungan dan ancaman terhadap kehidupan laut.

Sehingga keberadaannya yang tidak dikontrol dengan serius dapat membahayakan ekosistem lingkungan hidup. Hal ini diperkuat oleh (Lerdy, 2011) dalam studi ini disebutkan bahwa setiap tahunnya, populasi global menggunakan sekitar 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik, dengan setiap individu menggunakan sekitar 150 kantong plastik per tahun. Untuk memproduksi jumlah plastik tersebut, diperlukan sekitar 12 juta barel minyak dan penebangan sekitar 14 juta pohon sebagai bahan baku utama.

Jenna Jambeck menjelaskan di dalam penelitiannya yaitu *Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean* mengungkapkan potensi sampah plastik di lautan Indonesia pada tahun 2015 mencapai 187.2 juta ton/tahun (Jambeck & Geyer, 2015). Menurut informasi yang diterbitkan oleh KLHK, produksi limbah rata-rata di Indonesia mencapai 64 juta ton setiap tahun atau 175.000 ton per hari. Dalam hal produksi, satu individu bisa menghasilkan limbah sekitar 0,7 kg setiap harinya (PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Di Indonesia, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik di daratan, yang disebut sebagai Mismanaged Plastic Waste (MPW),

akhirnya mencemari lautan. Sebagian besar MPW ini berasal dari Pulau Jawa sebesar 129,3 ribu ton per tahun dan Sumatera sebesar 99,1 ribu ton per tahun. Secara nasional, sekitar 66,6% MPW yang mencemari lingkungan laut berasal dari daerah pedesaan, dengan rincian bahwa di Pulau Jawa, sekitar 45% berasal dari perkotaan dan sekitar 55% berasal dari pedesaan. Di Sumatera, Bali, dan Kalimantan, sekitar 70-75% MPW yang mencemari lingkungan laut berasal dari pedesaan, sementara di wilayah Indonesia Timur (Maluku, Sulawesi, dan Papua), angka ini meningkat menjadi 80-90% (World Bank, 2021).



Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Laut Nasional Tahun 2021

(Sumber : Direktorat PPKPL, 2021)

Berdasarkan data diatas (gambar 1.1) Secara keseluruhan, sampah plastik mendominasi jenis sampah lainnya dengan bobot mencapai 1432,37 gr/m², yang setara dengan 44% dari bobot total sampah yang teridentifikasi, dan rata-rata bernilai 59,68 gr/m². Sampah jenis kedua yang paling melimpah adalah kaca dan keramik, dengan bobot mencapai 498,98 gr/m² atau sekitar 15% dari bobot total sampah yang ditemukan, dan rata-rata 20,79 gr/m². Dari segi jumlahnya, plastik juga mendominasi dengan total kepadatan sekitar 162,17 pcs/m², dan sampah kaca serta keramik mencapai sekitar 55,78 pcs/m². Hasil analisis data pemantauan menunjukkan bahwa sampah yang paling umum ditemui dan memiliki kepadatan tertinggi di semua lokasi pada tahun

2021 adalah jenis sampah plastik. Jenis plastik ini mencakup kantong plastik dan wadah makanan cepat saji, yang paling sering ditemukan sebagai sampah plastik dengan kepadatan tertinggi sepanjang tahun 2021 (Direktorat PPKPL, 2021).

Sumber daya alam wilayah pesisir Indonesia sangat beragam dan bernilai ekonomi tinggi. Di antara sumber daya alam tersebut, terdapat ekosistem penting seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta sumber daya mineral seperti minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Berikut beberapa informasi menurut (Costanza et al., 1997) mengenai kondisi beberapa ekosistem di wilayah pesisir Indonesia, Terumbu karang: Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 25.000 km persegi. Meskipun sekitar 5,3% termasuk dalam kategori kondisi sangat baik, sebagian besar terumbu karang berada dalam kondisi baik (27,2%), cukup baik (37,3%), dan kurang baik (30,5%). Terumbu karang memiliki peran penting sebagai ekosistem pesisir yang kaya biodiversitas dan berperan sebagai tempat berkembangbiak dan perlindungan bagi banyak spesies laut.

Mangrove di Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia, mencakup sekitar 20% dari total luas mangrove global. Sayangnya, sekitar 29% ekosistem mangrove di Indonesia mengalami kerusakan pada tahun 2013. Meskipun demikian, ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomi yang tinggi, diperkirakan sekitar US\$ 2000-9000 per hektar per tahun (ITTO, 2010), Padang lamun: Padang lamun juga menjadi bagian penting dari ekosistem wilayah pesisir Indonesia. Nilai ekonominya sangat tinggi, diperkirakan mencapai US\$ 19.500 per hektar per tahun.

Kerusakan ekosistem pesisir, termasuk mangrove, lamun, dan terumbu karang, dapat berdampak serius pada keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari ekosistem ini sangatlah penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, kestabilan ekosistem, dan manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem ini menjadi langkah penting untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam di wilayah pesisir Indonesia (Costanza et al., 1997).

Perairan Indonesia memegang peranan penting sebagai lintasan transportasi strategis yang digunakan oleh kapal-kapal kargo dari negara-negara Asia dan Eropa saat berlayar menuju wilayah Asia Tenggara atau Australia, dan sebaliknya. Ditambah lagi perairan Indonesia berada di lokasi kunci antara produsen minyak di bagian barat dan konsumen minyak di bagian timur. Keberadaan ini memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa risiko, termasuk berpotensi terjadinya tumpahan minyak. Beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki risiko pencemaran akibat tumpahan minyak mencakup Selat Makassar, Pantai Selatan Jawa, Selat Lombok, dan Selat Malaka. Sebagai contoh, Selat Malaka sering dilalui oleh sekitar 200 sampai 300 kapal tanker setiap bulan (Kemenhub, 2021).

Heru Waluyo, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL), menekankan bahwa sekitar 70% polusi di wilayah pesisir dan pantai disebabkan oleh pembuangan sampah domestik, yang berasal dari masyarakat dan industri kecil. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun 50 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di permukiman pesisir di seluruh Indonesia dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah masyarakat.

Dalam konteks hukum internasional, terdapat berbagai perjanjian yang mengatur perlindungan ekosistem laut dari pencemaran yang berasal dari kapal, seperti air limbah, minyak, atau limbah selama pelayaran. *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) dalam Bagian XII mengatur tentang perlindungan lingkungan laut. UNCLOS mengidentifikasi enam penyebab polusi terhadap ekosistem laut, termasuk aktivitas di kawasan pantai, seperti aktivitas di wilayah pesisir, eksplorasi minyak di dasar laut, aktivitas penambangan di dasar laut, pembuangan sampah/limbah di laut, polusi akibat dari kegiatan kapal, juga polusi akibat lapisan atmosfer (Harumanti, 2020).

Air laut berperan sebagai komponen yang berhubungan dengan daratan, di mana limbah-limbah yang berasal dari daratan dapat mencapai laut terbuka melalui sungai atau jalur lainnya. Selain itu, air laut juga berperan sebagai tempat untuk menerima polutan yang turun dari atmosfer. Polutan-polutan ini berasal dari berbagai sumber dan kemudian terdistribusi ke dalam ekosistem

perairan, baik di sepanjang pantai maupun di laut Indonesia. Limbah-limbah yang mengandung polutan ini memiliki perilaku yang beragam setelah mencapai perairan laut. Sebagian dari zat-zat tersebut larut dalam air, sementara yang lainnya mengendap ke dasar laut dan menumpuk di dalam sedimen. Selanjutnya, sebagian dari polutan-polutan ini dapat meresap ke dalam organisme laut yang beragam seperti fitoplankton, ikan, cumi-cumi, udang, kerang, rumput laut, dan lain sebagainya (Adiguna, 2016).

Menurunnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) disebabkan oleh sejumlah isu, termasuk tingginya tingkat kekeruhan air, pencemaran oleh sampah padat dan cair, erosi, intrusi air laut, kekeringan, abrasi pantai, pendangkalan, dan banjir. Semua ini adalah permasalahan yang biasanya dihadapi di wilayah pesisir dan laut. Lebih parah yaitu aktivitas manusia yang telah merusak hutan bakau dan melakukan perubahan dari hutan rawa menjadi tambak. Menurut Primsyantanto seperti yang dijelaskan dalam (Triyadi, 2014) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan, pesisir, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, karakter masyarakat, serta tekanan hidup menyebabkan masyarakat pesisir sering melakukan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut dapat disebabkan oleh dua faktor utama: faktor alamiah dan akibat dari *antropogenik* kegiatan manusia. Faktor alamiah mencakup peristiwa alam seperti badai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, yang dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem pesisir dan laut. Namun, rusaknya lingkungan pesisir dan laut yang lebih signifikan sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran laut adalah salah satu akibat dari aktivitas manusia yang berdampak negatif pada lingkungan laut. Pencemaran ini dapat terjadi akibat pembuangan sampah organik ke laut, yang menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem dan merusak keindahan panorama laut. Selain itu, pencemaran juga terjadi akibat pembuangan limbah minyak ke laut, yang mana sumbernya belum diketahui dengan pasti. Diduga bahwa pembuangan limbah minyak berasal dari kegiatan kapal tanker wilayah perairan di antara Singapura dan Indonesia yang termasuk dalam daerah OPL (*Outer Port Limit*) adalah area di mana kapal-

kapal tanker memuat dan membongkar bahan bakar ke dan dari pelabuhan internasional di Singapura.

Dampak atau Gangguan dari Marine Litter atau sampah laut menurut (Ditjen PPKL, 2017) :

1. Mengganggu fauna laut dan ekosistem dasar laut: Makhluk-makhluk laut dapat terperangkap oleh sampah laut dan plastik, contohnya penyu laut yang terpengaruh. Selain itu, sampah laut dapat mencemari ekosistem dasar laut yang merupakan habitat vital bagi beragam makhluk laut.
2. Masuk ke dalam rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia: Sampah laut, terutama plastik, dapat masuk ke dalam rantai makanan laut dan berpotensi mengancam kesehatan manusia. Organisme laut dan burung laut telah dilaporkan mengonsumsi plastik dan jenis sampah laut lainnya. Sebagai contoh, tas plastik yang melayang di permukaan laut seringkali menyerupai ubur-ubur yang menjadi makanan bagi berbagai spesies ikan dan penyu laut.
3. Penumpukan dan penyebaran zat-zat beracun: Plastik menciptakan masalah dengan sifatnya yang tahan lama karena bisa menyerupai makanan dan menipu makhluk laut. Dampaknya adalah bisa menyebabkan kematian makhluk tersebut akibat paparan zat beracun yang terkandung dalam plastik.
4. Perubahan lingkungan karena spesies invasif: Sampah laut dapat membawa spesies asing ke wilayah barudan ini bisa mengakibatkan pembentukan koloni yang mengganggu ekosistem lokal. Spesies invasif ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem dan mempengaruhi populasi organisme lain di wilayah tersebut.

Dalam UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karenanya, negara, pemerintah, dan semua pihak yang berkepentingan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pengaturan lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan agar lingkungan

hidup di Indonesia dapat terus menjadi sumber dan penopang kehidupan bagi penduduk Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Menurut laporan dari (Indonesia OCEAN Justice Initiative, 2020) kondisi laut yang sehat dan terbebas dari polusi, termasuk pencemaran seperti sampah plastik, akan menjamin kelangsungan sumber daya ekonomi kelautan di Indonesia. Mengingat masalah yang kompleks ini, isu pencemaran laut diperlukan koordinasi yang efektif di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, industri, akademisi, LSM, serta pemerintah, terutama melalui pendekatan *collaborative governance*. Menurut (Chotimah et al., 2022) Ini sesuai dengan tujuan bersama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya kerjasama (*partnership*) dari seluruh pemangku kepentingan.

Kekhawatiran saat ini adalah bahwa sebagian besar proyek pembangunan di wilayah daratan dan laut masih memiliki dampak negatif pada lingkungan, yang akhirnya merusak kualitas ekosistem pesisir dan laut serta keberlanjutan sumber daya alam. Dampak ini meliputi polusi dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi berlebihan dari sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan upaya pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan yang mungkin muncul ke dalam kebijakan dan tindakan pengelolaan lingkungan di berbagai sektor pembangunan. Selain masalah tersebut, masalah lain adalah kurangnya integrasi dalam sistem manajemen. Saat ini, pengelolaan pesisir seringkali bersifat sektoral dan kurangnya koordinasi yang efektif antara pengelolaan daratan dan pengelolaan laut.

Dalam skema kebijakan publik, pemerintah dalam hal ini Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai aktor utama dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Pada program tersebut, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur seperti, pengembangan dan penyegaran Program Pesisir dan Laut Berkelanjutan, kerjasama dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut, termasuk kerjasama di tingkat nasional dan internasional, pengembangan serta pembaruan data dalam sistem informasi pencemaran dan kerusakan di pesisir dan laut, dan sejumlah aspek serupa (PPKPL, 2020).

Kerjasama dalam konteks ini menjadi sangat penting karena kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan dengan pendekatan konvensional yang terpusat memiliki keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat dan industri sering menghadapi tantangan di lapangan. Bahkan seringkali, pemerintah hanya diminta oleh LSM, perusahaan, atau warga negara untuk bergabung dalam upaya bersama untuk memecahkan masalah (Douglas et al., 2020). Konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) memiliki ciri khusus yang melibatkan semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik di tingkat internasional, nasional, regional, maupun dalam struktur swasta.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut oleh Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
Mendapatkan deskripsi dan memahami proses *collaborative governance* dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut oleh Ditjen PPKL Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dengan tujuan untuk memajukan ilmu pemerintahan melalui studi mengenai praktek *collaborative governance* dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut oleh Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat utama dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat memiliki manfaat praktis sebagai pedoman untuk pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam menerapkan *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir dan Laut oleh Ditjen PPKL di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, diharapkan menjadi sumber referensi ilmiah bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya dalam memberikan klarifikasi dan panduan bagi perjalanan penelitian, tetapi juga dalam menetapkan batasan-batasan pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini (Azwar, 2007). Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Karena menjelaskan arah dari tujuan magang riset ini, untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan digunakan, maka saya menggunakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan.

Konsep adalah istilah yang terdiri dari satu kata atau lebih yang merujuk pada suatu fenomena atau mencerminkan suatu ide tertentu. Ini melibatkan persepsi atau abstraksi yang terbentuk melalui penjelasan hal-hal tertentu dalam konteks penelitian, yang pada akhirnya digunakan untuk mengatur batasan-batasan yang terkait dengan konsep dasar dalam penelitian ini (Hasan, 2018).

1.5.1 *Collaborative Governance*

Menurut (Emerson et al., 2012) *Collaborative Governance* adalah suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan partisipasi konstruktif masyarakat. Ini melibatkan kerja sama antara entitas publik, berbagai level pemerintahan, serta sektor publik, swasta, dan sipil untuk mencapai tujuan publik yang sulit dicapai jika hanya dilakukan secara individu. Secara sederhana,

kolaborasi mengacu pada kerja sama antara dua maupun lebih pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya yang serupa, yang sulit dilakukan secara independen.

“Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai”. Emerson (2012) memandang dinamika kolaborasi sebagai rangkaian interaksi yang berulang-ulang. Emerson menekankan tiga elemen kunci dalam interaksi dinamika kolaborasi ini. Elemen-elemen tersebut mencakup keterlibatan yang berlandaskan pada prinsip bersama (*Principled engagement*), kemampuan untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*), dan motivasi yang bersama-sama (*shared motivation*).

1.5.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut adalah serangkaian kegiatan berkelanjutan yang melibatkan pengukuran, analisis, dan penyatuan data untuk menilai jumlah kontaminan atau polutan di lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari program pemantauan ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan langkah-langkah pengelolaan serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan (Latifah, 2004).

Direktorat PPKPL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tanggung jawab dalam:

- 1) Mempersiapkan perumusan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut.
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan.
- 3) Mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan.
- 4) Mengembangkan prosedur, standar, kriteria, dan norma yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut.
- 5) Memberikan panduan teknis dan mengevaluasi implementasi panduan teknis.
- 6) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut.
- 7) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan operasional Direktorat.

Upaya untuk mengembangkan kolaborasi dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut adalah aspek yang sama pentingnya. Dalam mendukung semua langkah tersebut, Ditjen PPKL melalui Direktorat PPKPL juga melakukan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kerjasama di tingkat internasional/regional, nasional, dan lokal dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Selain itu, kerjasama juga diperluas untuk mencakup perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta melibatkan dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan pesisir dan laut. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut mencakup pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu atau *Integrated Coastal Management* (ICM) di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Bali, Kota Bontang, Kabupaten Tangerang dan Kota Semarang yang didukung oleh beberapa perguruan tinggi (UNDIP, IPB, UNLAM, UDAYANA, dan UNRAM) ¹.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional berperan dalam mengoperasikan konsep-konsep

¹ <https://ppkl.menlhk.go.id/>

yang ada agar variabel yang diperlukan dapat didefinisikan dengan jelas. Definisi operasional mencakup indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel-variabel tersebut, sehingga memberikan deskripsi yang konkret tentang variabel-variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional adalah panduan prosedur yang memungkinkan penilaian keberadaan atau ketiadaan fenomena tertentu sesuai dengan konsep yang ada. Sehingga dalam penelitian ini dioperasikan melalui konsep-konsep dengan variabel, meliputi:

A. Penggerakan Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Penggerakan prinsip bersama adalah proses yang berkelanjutan dalam konteks kolaborasi. Metode seperti berkomunikasi secara langsung atau menggunakan teknologi sebagai sarana interaksi digunakan untuk mendorong adopsi prinsip bersama. Dalam komponen ini, fokus diberikan pada pemahaman ulang tujuan bersama, pembentukan, dan perkembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering kali tercermin dalam berbagai sudut pandang yang diungkapkan oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip-prinsip bersama menjadi inti dari proses ini.

Terdapat tiga elemen dalam penggerakan prinsip bersama, yaitu :

1. Pengungkapan kepentingan dari para pemangku kepentingan dalam Program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut (*discovery*)
2. Diskusi bersama yang dilakukan pemangku kepentingan (*deliberation*)
3. Penetapan maksud dan tujuan kolaborasi (*determinations*)

B. Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama

ujuan kolaborasi adalah untuk mencapai hasil bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Seringkali, beberapa pihak yang berkolaborasi tidak memiliki kemampuan untuk bertindak bersama-sama karena perbedaan dan ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, kapasitas, yang didefinisikan sebagai berbagai elemen yang meliputi kemampuan lintas fungsional untuk menciptakan tindakan yang efektif, sangat

penting untuk aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Kejelasan dalam prosedur, kesepakatan bersama yang diatur secara legal, manajemen pengetahuan, pengaruh kepemimpinan, dan manajemen sumber daya merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas aktor-aktor tersebut, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bekerjasama secara efektif. Terdapat beberapa elemen yaitu:

1. Prosedur dan kesepakatan insitusi (*procedural and insitutional arrangements*)
2. Kepemimpinan (*leadership*)
3. Pengetahuan (*knowledge*)
4. Sumber daya (*resources*)

Diharapkan dari adanya kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan lembaga/kementerian serta stakeholders lainnya mampu menghasilkan komitmen yang dapat membantu dalam mengatasi masalah pencemaran laut yang berasal dari aktivitas yang berbasis di daratan. Upaya ini seharusnya melibatkan semua elemen lintas fungsi dan dijalankan melalui kerangka kerjasama antara para pemangku kepentingan dengan peningkatan kapasitas dalam hal sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi.

C. Motivasi bersama (*shared motivation*)

etiap dorongan atau motivasi yang diarahkan kepada unsur ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam usaha untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Sebaliknya, jika unsur ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal pembinaan, motivasi, dan pengawasan, maka hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, peran KLHK melalui Ditjen PPKL sangat krusial dalam program tersebut melalui kolaborasi, motivasi yang melibatkan masyarakat, industri, akademisi, dan LSM. Sementara itu, peran LSM dan masyarakat sebagai penghubung memiliki kekuatan dalam memotivasi dan

memberikan suara vokal, tetapi mereka juga memiliki ketergantungan pada pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat dan meningkatkan proses penggerakan prinsip bersama. Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri empat elemen saling menguntungkan diantaranya :

1. Kepercayaan bersama (*Mutual trust*)
2. Pemahaman bersama (*Mutual understanding*)
3. Legitimasi internal (*Internal legitimation*)
4. Komitmen (*Commitment*)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif merupakan tahap dari pengembangan ilmu artinya bias saja konsep, hipotesis maupun teori sudah ditemukan pada penelitian tahap 1 (Eksploratif). Memberikan uraian deskriptif mengenai suatu kolektifitas atau gejala sosial yang terjadi dan melukiskan realitas yang kompleks sehingga mudah untuk difahami. Menurut (Nawawi, 1991) : “Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedut pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, Lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya”.

Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin menggambarkan dengan lebih rinci, jelas, dan dalam mengenai keadaan yang akan diselidiki di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan situasi atau peristiwa secara detail, sehingga data yang dikumpulkan akan bersifat deskriptif dan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan ialah untuk menelusuri

permasalahan yang akan diselidiki dengan cara mengklarifikasi dan mendefinisikan bentuk *Collaborative Governance* Ditjen PPKL dalam pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan pesisir.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pemahaman mengenai teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun informasi dan data yang relevan dengan tujuan untuk mengklarifikasi tingkat keakuratan data, sehingga data tersebut dapat dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Data dapat diperoleh baik melalui pengumpulan data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi dan interaksi dengan narasumber, maupun melalui data sekunder. Data yang diperoleh harus diolah oleh peneliti dengan mematuhi prinsip-prinsip ilmiah untuk menjaga obyektivitas, dan data ini harus disajikan secara terstruktur.

a) Observasi

Prof. Heru mendefinisikan observasi sebagai berikut “Mengemukakan Observasi sebagai studi yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah (Heru, 2015). Hasil observasi ilmiah ini, dijelaskan secara teliti, tepat dan akurat, serta tidak diperbolehkan untuk ditambah atau dikurangi dan dibuat-buat sesuai keinginan peneliti”.

Menurut (Hadi, 2002) metode observasi adalah tindakan mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti atau kerjasamanya mencatat informasi sebagaimana yang mereka amati selama penelitian. Dalam penelitian ini, berbagai jenis observasi dilakukan, yaitu:

1. Observasi Non Partisipan, ini berarti penulis tidak terlibat atau tidak turut serta secara langsung dalam kegiatan yang diamati.
2. Observasi yang Berstruktur, artinya bahwa penulis melakukan observasi dengan mengacu pada panduan atau pedoman yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

b) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancara yang memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan Teknik Wawancara Berstruktur agar data yang diperoleh tetap fokus dan relevan dengan masalah penelitian, sehingga informasi yang diinginkan dari narasumber dapat diperoleh dengan tepat. Teknik Wawancara terstruktur kepada Ibu Hanum selaku staf Setditjen PPKL, Pak Iwan selaku Kasie Program dan Kerjasama Ditjen PPKL, Pak Suprianus selaku staf Ditjen PPKL, Pak Mustakim selaku staf Ditjen PPKL, Pak Komang selaku Dewan Komisari PT PLN Nusantara, Ibu Inayah selaku masyarakat sekitar Pantai grinting Kabupaten probolinggo, Ibu Wiji selaku masyarakat sekitar Pantai Grinting Kabupaten Probolinggo.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode kualitatif dimana suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada, yakni berupa catatan transkrip, buku dan lain sebagainya. Pada dasarnya dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiono dalam (Saputri, 2017) bahwa dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang telah berlalu. Data yang diperoleh

dalam dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

1.7.3 Subjek Penelitian

1.7.4 Subjek penelitian ini merujuk kepada individu yang berperan sebagai narasumber yang mampu memberikan data yang relevan dengan topik penelitian (Amirin, 1986). Dalam penelitian ini, subjek terdiri dari:

- 1) Setditjen PPKL. Adapun subjek penelitian tersebut dipilih dikarenakan Setditjen PPKL menjadi salah satu pihak yang ikut dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kerja sama teknik, pemantaua, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melewati bu Hanum sakinah, selaku Pranata Humas Ahli Muda Setdijen PPKL, beliau yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Staf dari Direktorat PPKPL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut), yang juga memiliki pengalaman sebagai mantan penyuluh kelautan. Objek penelitian ini adalah subjek utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah persepsi yang dimiliki oleh Pak Iwan selaku staf Direktorat PPKPL, beliau juga pernah menjadi penyuluh kelautan dan pernah terlibat langsung menjadi aktor *Collaborative governance* dalam berbagai macam program dari Ditjen PPKL.

1.7.5 Sumber Data

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diekspresikan dalam bentuk kalimat atau deskripsi. Jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder ini diperoleh melalui wawancara lapangan dengan pihak-pihak terkait di instansi pemerintahan setempat.

- a) Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dari data penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di tempat penelitian. Informan merupakan seorang yang memberikan informasi tentang suasana dan keadaan latar penelitian, Data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang sedang diteliti (Moleong, 2006).

Dalam proses wawancara ini, beberapa narasumber yang relevan dengan topik penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam subjek penelitian, akan terlibat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Informan yang akan dipilih berdasarkan pada kebutuhan penelitian serta keterkaitan dengan topik penelitian yang diambil. Dengan hal ini, yang dituju sebagai informan adalah staf Setditjen PPKL beserta staf dari Direktorat PPKPL sekaligus mantan penyuluh kelautan.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang awalnya tidak dikumpulkan untuk tujuan penelitian, tetapi dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memerlukan informasi tersebut. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka atau dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, data sekunder ini berbentuk dokumen.

Data kedua atau sekunder yang diambil dalam penelitian yakni Lapoan Kinerja KLHK 2019, Renstra KLHK 2020-2024, Renstra Ditjen PPKL 2020-2024, Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019, Laporan Kinerja Ditjen PPKL tahun 2020, Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020, Restra Ditjen PPKL Tahun 2020, Buku statistik Ditjen PPKL 2019, Laporan Kinerja Ditjen PPKL 2021, dan Laporan Kinerja Ditjen PPKL 2022.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian memiliki

tujuan untuk memperjelas area yang menjadi fokus dalam penelitian. Penulis memilih kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tepatnya di Jakarta Timur. Dipilihnya sebagai lokasi penelitian karena sebelumnya belum ada penelitian yang serupa yang dilakukan di tempat ini, terutama yang berkaitan dengan topik *Collaborative Governance* dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

1.7.7 Unit Analisa Data

Proses analisis data adalah elemen kunci dalam menguraikan dan menyelidiki data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, khususnya dalam jenis penelitian deskriptif, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis data kualitatif terhadap organisasi, dalam hal ini, Ditjen PPKL. Beberapa definisi yang menggambarkan analisis data kualitatif dari berbagai ahli adalah sebagai berikut:

Bogdan dan Biklen mengartikan analisis data kualitatif sebagai “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinsiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang disebut dalam penelitian oleh (Wijaya, 2012) penelitian kualitatif (*post-positivisme*) memiliki lima karakteristik utama:

- a. Pendekatan Naturalistik: Penelitian kualitatif menggunakan situasi sebenarnya sebagai sumber utama data, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.
- b. Data Deskriptif: Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif harus dideskripsikan secara rinci dan bukan hanya dalam bentuk angka. Data ini dapat mencakup bukti-bukti seperti foto, video, rekaman, dokumen pribadi, dan catatan.

- c. Fokus pada Proses: Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman proses daripada sekadar hasil atau produk. Peneliti terlibat dalam pengalaman alamiah dan situasi yang sebenarnya bersama partisipan, dan proses ini sangat penting dalam pemahaman masalah penelitian.
- d. Pendekatan Induktif: Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih cenderung bersifat induktif, yang berarti peneliti menggerakkan analisis dari hal-hal yang khusus ke konsep yang lebih umum. Peneliti tidak merumuskan hipotesis sebelumnya, tetapi merumuskan masalah penelitian berdasarkan temuan dalam data yang diperoleh.
- e. Fokus pada Makna: Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengejar pemahaman mendalam, bukan hanya generalisasi. Peneliti mencari dan menemukan makna melalui proses alamiah yang berlangsung selama penelitian, sehingga hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, proses analisis data akan melibatkan beberapa tahap, yakni:

- a. Mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Mereduksi data dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan kategori masalah penelitian, langkah ini dilakukan untuk menjernihkan dan menyelesaikan seluruh data yang masuk berdasarkan kategori.
- c. Data akan diproses dan diolah dengan tujuan menemukan pola dalam bentuk narasi. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena yang diamati serta hubungan antar data dengan menggunakan proses interpretasi yang rasional.
- d. Analisis data merupakan langkah akhir dalam penelitian di mana kesimpulan ditarik berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.